

# Wacana Demokrasi di Media *Online* Kelompok Muslim Indonesia dan Malaysia

Lestari Nurhajati

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

E-mail : [lestari@uai.ac.id](mailto:lestari@uai.ac.id)

*Abstrak* – Kekerasan demi kekerasan atas nama agama makin sering terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh kelompok Islam garis keras dan radikal. Nilai kemanusiaan dan demokrasi pun seolah diterabas dengan bebasnya, padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu berbangga diri sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk sangat besar. Sementara itu Malaysia yang juga memiliki banyak kelompok Islam garis keras dan radikal justru tidak terjadi aksi kekerasan atas nama agama di masyarakat akar rumputnya. Pergulatan atas nama agama yang dipertentangkan dengan nilai-nilai demokrasi kemudian pun menghadirkan sebuah permasalahan tersendiri yakni: bagaimana pemaknaan demokrasi pada kelompok Islam di Indonesia dan Malaysia? Apakah benar bahwa nilai-nilai demokrasi dianggap semata-mata produk barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ? Habermas mengatakan bahwa dengan komunikasi yang emansipatoris maka demokrasi akan tercapai. Tindakan komunikatif, yakni saling berdiskusi, memberi keyakinan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, tanpa ada pemaksaan kehendak, dan tanpa kekerasan, akan menciptakan ruang publik (*public sphere*) yang kondusif (termasuk ruang publik melalui media *online*). Hal ini seharusnya berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wacana teks pada media *online* kelompok-kelompok Islam baik di Indonesia maupun di Malaysia.

*Abstract* – Violence in the name of religion increasingly frequent in Indonesia, mainly carried out by Islamic hardliners and radicals. Humanitarian and democratic values were violated as freely, but so far the people of Indonesia are always proud of ourselves as a

democratic country with a very large population. Meanwhile Malaysia which also has a lot of hard-line Islamic groups and radical violence did not happen in the name of religion in society grassroots. Struggle in the name of religion as opposed to democratic values and then also presents a separate problem: how the meaning of democracy in Indonesia and Malaysia Islam di group? Is it true that democratic values are considered solely western products and not in accordance with Islamic values? Habermas says that the emancipatory communication then democracy will be achieved. Communicative action, namely mutual discussion, giving confidence freely without any pressure from any party, without the imposition of the will, and without violence, would create a public space (public sphere) that is conducive (including public spaces through online media). This should apply in Indonesia. This study used a qualitative method of discourse analysis techniques in the online media texts Islamic groups in Indonesia and Malaysia.

*Keywords* – democracy, the public sphere, the Islamic group, online media.

## I. PENDAHULUAN

Ketika masyarakat membaca surat kabar, melihat tayangan televisi, dan membuka internet, maka pemberitaan yang berkaitan dengan kekerasan atas nama agama makin terlihat jelas. Semua kelompok agama di berbagai belahan dunia yang menekankan fundamentalis seolah berlanjut dengan metode kekerasan untuk memperkuat dan membenaran atas ideologi kekerasan ini. Termasuk di Indonesia dengan beberapa kelompok Islam garis kerasnya.

Kekerasan demi kekerasan atas nama agama makin sering terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis, garis keras dan radikal. Mereka selalu mencoba memaksakan kehendaknya – dengan cara kekerasan - agar orang lain setuju dan ikut dengan ideologi mereka. Agama pun menjadi legitimasi politik. Nilai kemanusiaan dan demokrasi pun seolah diabaikan begitu saja. Meski kita tahu bahwa negara Indonesia diakui sebagai negara demokrasi dengan penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India, namun seolah indikator nilai demokrasi itu pun kembali dipertanyakan. Bahkan ada sebagian kalangan Islam yang menganggap demokrasi ini adalah nilai-nilai barat yang diadopsi oleh masyarakat, termasuk yang di Indonesia dan demokrasi ini tidak sejalan dengan syariah Islam, karena pembuatan hukum adalah kekuasaan absolut Tuhan, bukan kekuasaan manusia.

Media baru yang membawa nama Islam seperti: Eramuslim.com, muslim.or.id, hizbut-tahrir.or.id juga makin sering memuat tulisan dan pemberitaan yang memuat isu tentang tidak sinkronnya Islam dengan konsep demokrasi. Judul-judul yang provokatif digunakan oleh berbagai media baru atas nama Islam untuk mempertentangkan antara Islam dengan Demokrasi. Misalnya saja: Kesombongan Sistem Demokrasi, Wajar Kita Anti Demokrasi karena Sistem Ini Gagal Menegakkan Keadilan (eramuslim.com), Syura dalam Pandangan Islam dan Demokrasi (muslim.or.id).

Pergulatan atas nama agama yang dipertentangan dengan nilai-nilai demokrasi kemudian pun menghadirkan sebuah permasalahan tersendiri yakni: bagaimana pemaknaan demokrasi dan juga kegiatan komunikasi politik di kelompok Islam yang berada di Indonesia dan Malaysia? Apakah benar bahwa nilai-nilai demokrasi dianggap semata-mata produk barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam?

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1. Bahasa dan Komunikasi

Bahasa sebagai bagian dalam komunikasi secara tegas diungkapkan oleh Ellis (Littlejohn, 2002), dengan pendekatan teori bahasa dan wacana yang melihat kegiatan komunikasi dengan bahasa ini bertujuan untuk adanya saling pemahaman makna dalam berkomunikasi. Masih menurut Ellis,

manusia adalah pengguna bahasa dan sekaligus pembuat pesan, kemudian teori komunikasi mengajak masyarakat dalam memahami bagaimana pesan-pesan diinterpretasikan, dievaluasi, dipahami, dan dibuat. Jika tujuan dari komunikasi ini untuk saling adanya pemahaman, maka secara ideal bentuk komunikasinya pun harusnya bersifat dua arah serta memunculkan peran antara komunikator dan komunikannya yang berjalan seimbang. Fairclough (1995) menyatakan bahwa pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan, merupakan bagian dari praktik kehidupan sosial. Di mana praktik sosial tersebut bisa saja menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Kemudian dengan pendekatan wacana kritis dapat dilihat bahwa bahasa bisa digunakan untuk melihat terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

### 2.2. Bahasa, Komunikasi Politik dan *Public Sphere*

Untuk memahami lebih lanjut betapa ketidakterpisahan antara bahasa, politik dan komunikasi politik itu sendiri, maka teori tentang hubungan bahasa dan politik pun perlu digali lebih mendalam. Chilton (2004) secara rinci membahas tentang hubungan bahasa dan politik, proses interaksinya, juga representasinya, termasuk penggunaan bahasa dengan pendekatan agama yang dipergunakan dalam komunikasi politik. Menurut Chilton, sesuai tradisi politik yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara bahasa dan politik dalam tahapan yang sangat mendasar. Bahkan kegiatan manusia secara umum dalam bentuk apapun yang bisa diterjemahkan sebagai kegiatan politik, tidak akan diakui keberadaannya tanpa penggunaan bahasa itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa aksi politik adalah aksi bahasa itu sendiri.

Sementara itu apabila kita membahas penggunaan bahasa dengan pendekatan teori Tindakan Komunikatif, maka akan makin terlihat bahwa bahasa itu bisa digunakan untuk mengkomunikasikan kesadaran kolektif, tidak secara institusi terjadi melainkan pada tiap individu yang menjalaninya (Habermas, 1989). Masih menurut Habermas, Tindakan Komunikatif itu sendiri memiliki tiga komponen struktural dari aksi bicara yakni *the propositional*, *the illocutionary*, dan *the expressive*. Secara ringkas bisa dijelaskan bahwa *the propositional* itu melihat

bahwa ada kebenaran pada isi pernyataan yang dilakukan oleh komunikator yang berkaitan dengan sebuah obyek, situasi maupun peristiwa.

Sementara itu *the illocutionary* memiliki pengertian bahwa pernyataan yang digunakan untuk pemenuhan maksud. Bahwa komunikator menekankan pentingnya pihak komunikan mengerti apa maksud pernyataannya. Kemudian *the expressive* merujuk pada pernyataan dan sekaligus tindakan yang mengkomunikasikan beberapa aspek keadaan psikologis komunikator pada komunikannya. Jadi bicara dan berkomunikasi (dengan kata dan bahasa) bukan sekedar digunakan untuk menandakan sesuatu, melainkan -kan juga untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu.

Sementara itu Nimmo (2005) juga menegaskan bahwa bahasa sebagai permainan kata dalam sebuah pembicaraan politik, permainan ini merupakan permainan yang sangat serius. Tentu saja pembicaraan politik itu merundingkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan bersama dalam situasi-situasi konflik pemaknaan (semantik). Masih menurut Nimmo ada 3 kesimpangsiuran semantik, yang pertama adanya kekeliruan karena verba transitif, kedua karena adanya penggunaan kata atau lambang linguistik yang lain namun seakan-akan ia adalah objek yang diwakilinya, yang ketiga karena adanya reaksi identifikasi (yakni menanggapi lambang pada objek yang berbeda namun dengan makna yang sama hanya karena semata-mata adanya kesamaan nama dari lambang tersebut).

### 2.3. Demokrasi Dianggap Bertentangan dengan Agama Islam

Makna demokrasi memang berkembang dari tahun ke tahun, terutama bila dilihat dari sisi kesejarahan di Indonesia maupun Malaysia. Pemaknaan demokrasi ini tidak terlepas dari bagaimana kelompok Islam yang ada di dua negara ini menggunakan istilah demokrasi sebagai bagian dari kegiatan komunikasi politik.

Bahasa sebagai simbol yang menjadi bagian dari komunikasi politik, juga hadir pada politik Islam. Politik Islam itu sendiri memang pada dasarnya terbentuk dari penggunaan instrumental Islam yang berupa ide, simbol dan nilai, yang kemudian oleh individu, kelompok, dan organisasi dijadikan tujuan politik. Sehingga terbukti bahwa respon politik pada masyarakat saat ini dalam menghadapi tantangan dan bayangan masa depan, dilandasi

konsep layak tidaknya lagi, sertapenemuan ulang (*reappropriate* dan *reinvented*), yang merupakan konsep pinjaman dari tradisi Islam sejak dulu (Ayoob, 2004). Menurut Anderson (2008), semua bahasa adalah sekumpulan tanda yang sama jauhnya, dan karenanya bisa saling dipertukarkan.

Demikian juga seharusnya memaknai kata demokrasi. Namun tentu saja ini menjadi terlihat sulit pada kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang melihat bahwa demokrasi adalah “adopsi” dari barat – westernisasi.

Pemahaman semacam ini makin tampak menonjol di masyarakat Islam saat ini, sehingga kemudian lebih mudah mempertentangkan demokrasi dengan Islam itu sendiri. Secara sederhana didapatkan gambaran bahwa di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terjadi proses pergeseran pemaknaan demokrasi dengan agama Islam. Penggunaan makna kata tertentu, dalam hal ini demokrasi, dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Dari perspektif tersebut bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus sekaligus menciptakan realitas (Hamad, 2004).

Yang menarik misalnya terjadi di Malaysia pada tahun 2007, ketika gelombang protes besar-besaran, antara 5000-10.000 demonstran dari penganut agama Hindu, mengajukan aksi atas upaya pembatasan bahkan penghancuran kuil-kuil Hindu, mengatasnamakan keberadaan kuil ibadah Hindu tersebut bertentangan dengan syariah Islam (Goh, 2009). Pada saat itulah pertanyaan dan pernyataan makna demokrasi dilontarkan oleh berbagai pihak, termasuk media di Malaysia, dan tidak jarang kemudian konsep demokrasi ini dibenturkan dengan ketidaksinambungannya dengan konsep yang ada dalam Islam.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis konstruktivisme karena penelitian ini berusaha memberdayakan kesadaran akan makna demokrasi di antara masyarakat baik melalui media maupun tidak. Menurut Patton (2002), penelitian kualitatif berkembang dari 3 cara pengumpulan data yakni yang pertama melalui wawancara mendalam, yang kedua melalui observasi langsung, dan yang ketiga dengan pencatatan dokumen, dalam hal ini menggunakan

analisis wacana teks. Analisis data kualitatif ini seringkali berasal dari hasil penelitian secara langsung

Pada tahapan penelitian ini maka makna kata “demokrasi” akan dikaji lebih mendalam. Karena kata-kata ini makin sering dipergunakan oleh kelompok Islam baik di Indonesia maupun di Malaysia. Seperti yang terlihat diberbagai media baru yang membawa nama Islam seperti: Eramuslim.com, muslim.or.id, ismaweb.net, dan pembina.com.my juga makin sering memuat tulisan dan pemberitaan yang memuat isu tentang tidak sinkronnya Islam dengan konsep demokrasi. Judul-judul yang provokatif digunakan oleh berbagai media baru atas nama Islam untuk mempertentangkan antara Islam dengan demokrasi.

#### IV. TEMUAN DAN ANALISIS DATA

##### 1. Muslim.or.id



Gambar 1. Website muslim.or.id

Artikel dengan judul: “Syura dalam Pandangan Islam dan Demokrasi” ini sesungguhnya merupakan artikel yang mempertentangkan demokrasi dengan Islam. Artikel ini ditulis oleh seseorang yang bernama Muhammad Ikhwan Muslim, dengan alamat website personalnya [Http://Ikhwanmuslim.com](http://Ikhwanmuslim.com). Setelah ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa penulis adalah Alumni dan pengajar Ma'had Al Ilmi Yogyakarta.

Pada materi artikel yang dimuat di muslim.or.id ini tampak awalnya berusaha bersifat netral, yakni diawali dengan paragraf:

“Sebagian kaum muslimin mengidentikkan antara syura dan demokrasi, menganggap sama

antara keduanya, atau minimal membenarkan demokrasi karena musyawarah/syura juga diakui dalam sistem demokrasi. Artikel ini berusaha memaparkan syura secara ringkas dan nantinya akan berujung pada pemaparan sisi-sisi perbedaan antara syura dan demokrasi yang merupakan produk sekulerisme”.

Dari sini tampak jelas penulis artikel mencoba menampilkan upaya yang obyektif dalam artikel yang dia sampaikan. Kemudian setelah itu secara terstruktur, artikel ini rapi menjabarkan definisi Syura dalam beberapa kategori:

“Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu [Mu'jam Maqayis al-Lughah 3/226].

Sedangkan secara istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantara mereka adalah Ar Raghīb al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura [Al Mufradat fi Gharib al-Quran hlm. 207].

Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki [Ahkam al-Quran 1/297].

Sedangkan definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer diantaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran [Asy Syura fi Zhilli Nizhami al-Hukm al-Islami”.

Kemudian penulis masih dalam bahasa yang sangat netral membuat kesimpulan:

“Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, kita dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi [Asy Syura fi al-Kitab wa as-Sunnah”.

Kemudian dipembahasan berikutnya penulis mulai menggunakan pendekatan dengan menyitir beberapa ayat dalam Al Hadist dan Al-Quran, seperti :

“ Dalam kehidupan individu, para sahabat sering meminta pendapat rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam masalah-masalah yang bersifat personal. Sebagai contoh adalah tindakan Fathimah yang meminta pendapat kepada nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika Mu’awiyah dan Abu Jahm berkeinginan untuk melamarnya [HR. Muslim : 1480].

Dalam kehidupan berkeluarga, hal ini diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 233, dimana Allah berfirman,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
ثُمَّ مَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
(٢٣٣)

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan“. [Al Baqarah : 233].

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Al Quran telah menceritakan bahwa syura telah dilakukan oleh kaum terdahulu seperti kaum Sabaiyah yang dipimpin oleh ratunya, yaitu Balqis. Pada surat an-Naml ayat 29-34 menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh Balqis dan para pembesar dari kaumnya guna mencari solusi menghadapi nabi Sulaiman ‘alahissalam.

Demikian pula Allah telah memerintahkan rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan. Allah *Ta’ala* berfirman,

مَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنْتُ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْكَ  
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“. [Ali ‘Imran : 159].

Di dalam ayat yang lain, di surat Asy Syura ayat 38, Allah *Ta’ala* berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka“. [Asy Syura : 36-39].

Maksud firman Allah *Ta’ala* (yang artinya), “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka” adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai mereka saling bermusyawarah mengenai hal itu agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka seperti dalam masalah peperangan dan semisalnya [Tafsir al-Quran al-‘Azhim 7/211].

Setelah berbagai potongan surat dan ayat dalam Al-Quran disadur untuk menekankan betapa pentingnya Syura, kemudian penulis mulai menunjukkan perbedaan antara Syura dan demokrasi. Diawali dengan paragraf kalimat sebagai berikut :

“Telah disebutkan sebelumnya bahwa artikel ini berusaha untuk memaparkan sisi-sisi perbedaan antara syura dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat syura berarti meminta pendapat (*thalab ar-ra’yi*) sehingga dia adalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (nizham as-Siyasah al-Islamiyah). Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat [Syura bukan Demokrasi karya M. Shiddiq al-Jawi]. Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara system pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri”

Untuk selanjutnya artikel ditekankan tentang tidak Islaminya demokrasi :

“Sistem demokrasi hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materil demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer. Sistem ini tidaklah memperhatikan aspek ruhiyah. Berbeda tentunya dengan sistem Islam, dia tetap memperhatikan faktor-faktor tersebut tanpa mengenyampingkan aspek ruhiyah diniyah, bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam,

aspek ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan kemashlahatan manusia yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di belakangnya [Asy Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Ghariyyah hlm. 25].”

Juga kalimat-kalimat dalam paragraf berikutnya :

“Di dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat dimentahkan, demikian pula peraturan baru yang sesuai dengan keinginan dan tujuan masyarakat dapat disusun dan diterapkan.

Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali berpatokan pada hukum Allah suhanahu wa ta’ala. Masyarakat tidaklah diperkenankan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam yang telah diterangkan-Nya dalam al-Quran dan lisan nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Demikian juga dalam permasalahan ijthadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang sesuai dengan syari’at [An Nazhariyaat as-Siyaasiyah al-Islamiyah hlm. 338]”

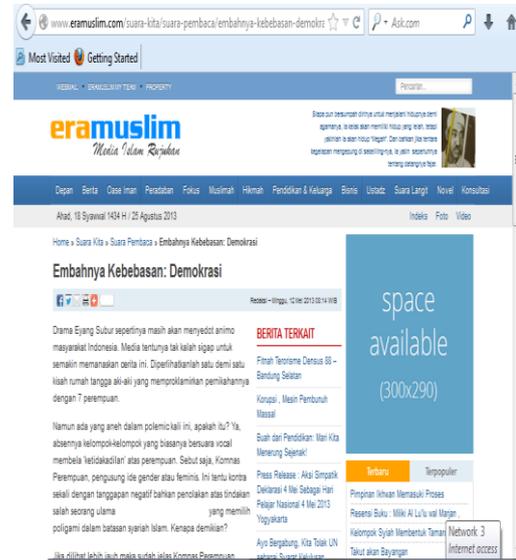
Beragam upaya untuk menunjukkan kekurangan demokrasi dan sempurnanya sistem Syura kemudian disusun oleh penulis artikel dalam sistem point dengan pemberian kode abjad, mulai dari a sampak l, yang artinya ada 12 point yang menunjukkan “keburukan” demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam.

Sehingga jelas memang penulis memiliki keberpihakan yang tidak terbantahkan untuk dikategorikan sebagai anti demokrasi. Meskipun demikian pada bagian akhir tulisan tetap ditutup dengan satu paragraf yang berusaha “tampak” netral dan obyektif:

“Meskipun ada persamaan antara syura dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.”

## 2. www.Eramuslim.com

Pada artikel dengan judul: “Embahnya Kebebasan: Demokrasi” yang dimuat oleh eramuslim.com ini secara jelas mencantumkan nama dan institusi penulisnya yakni: Arini, Mahasiswi Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Semester 8.



Gambar 2. Website eramuslim.com

Pada artikel yang mengkaitkan antara demokrasi dengan Eyang Subur ini menunjukkan upaya yang kurang sistematis sang penulis atas penolakannya pada demokrasi. Hal ini dikarenakan upaya penulis yang mencoba melakukan *jumping conclusion*, antara tidak campur tanganya Komnas HAM Perempuan dengan isu pernikahan Eyang Subur dengan 8 istrinya, yang oleh penulis ditulis 7 istrinya.

Pada artikel tersebut langsung diawali dengan paragraf yang merujuk pada kasus Eyang Subur : “Drama Eyang Subur sepertinya masih akan menyedot animo masyarakat Indonesia. Media tentunya tak kalah sigap untuk semakin memanaskan cerita ini. Diperlihatkanlah satu demi satu kisah rumah tangga aki-aki yang memproklamirkan pernikahannya dengan 7 perempuan”

Ketidakakuratan data tampak ketika penulis menulis jumlah istri Eyang Subur 7 yang seharusnya 8 orang. Kemudian pada paragraf berikutnya mulailah energi kemarahan penulis pada Komnas HAM Perempuan dituturkan:

“Namun ada yang aneh dalam polemik kali ini, apakah itu? Ya, absennya kelompok-kelompok

yang biasanya bersuara vocal membela 'ketidakadilan' atas perempuan. Sebut saja, Komnas Perempuan, pengusung ide gender atau feminis. Ini tentu kontra sekali dengan tanggapan negatif bahkan penolakan atas tindakan salah seorang ulama yang memilih poligami dalam batasan syariah Islam. *Kenapa demikian?*

Jika dilihat lebih jauh maka sudah jelas Komnas Perempuan adalah pihak yang begitu konsisten untuk menyuarakan bahwa aturan agama adalah pelanggaran diskriminasi terhadap perempuan. Jika tidak berkaitan dengan syariah Islam, maka jangan harap mereka bersuara. Inilah muka dua pemuja kebebasan dalam sistem demokrasi”.

Pada bagian akhir inilah lompatan kesimpulan dilakukan penulis berkaitan dengan hubungan antara demokrasi dan tidak Bergeraknya Komnas HAM Perempuan. Termasuk menyitir bahwa adanya penolakan atas poligami seorang ulama oleh kelompok pengusung isu gender dan feminis yang dihubungkan sebagai bagian dari Komnas HAM Perempuan. Tentu saja ini sungguh rancu, karena tidak semua pengusung isu gender maupun feminis adalah anggota Komnas HAM Perempuan.

Kemudian pada beberapa paragraf berikutnya penulis menunjukkan keberpihakannya pada poligami seperti dalam kalimat-kalimat :

“Sayangnya, ditengah kelemahan aqidah umat Islam, provokasi musuh-musuh Islam begitu mengena. Propaganda media begitu mudah mengubah pandangan masyarakat. Inilah ketika tidak ada perlindungan aqidah dan penjagaan atas informasi yang diterima oleh umat Islam. Syariat Islam didebatkan, yang haram dimaklumkan. MashaAllah, beginilah wajah asli demokrasi. Sistem kehidupan yang meniscayakan pemisahan agama dalam kehidupan.

Selayaknya, sebagai umat Islam tentulah kita seharusnya melandaskan setiap perbuatan dengan hukum syara, sebagaimana kaidah syara “setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara”. Apakah perbuatan itu terkait urusan individu, bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Namun, lagi-lagi, dalam sistem sekuler ini, hukum syara dipelintir atas nama kepentingan individu atau golongan. Yang lebih parah lagi, memang ada orang-orang yang bersengaja mengubah hukum Islam sesuai persepsinya dan merusak aqidah umat. Termasuk

dalam memandang urusan pernikahan dan poligami yang sebenarnya telah jelas di dalam Al Quran.”

Kemudian diperkuat dengan satu paragraf lagi yang menekankan dukungannya terhadap isu poligami :

“Allah SWT telah menjadikan nikah sebagai bagian dari ibadah kepadaNya, yaitu sebagai pelaksanaan sunnah RasulNya. Allah pun telah memberikan kebolehan bagi kaum Adam untuk menikahi lebih dari 1 orang perempuan hingga empat orang yang dibarengi dengan persyaratan mampu berbuat adil. Allah pun telah mengatur bagaimana selayaknya suami menghargai dan memenuhi kewajiban serta hak atas istrinya, pun sebaliknya istri atas suami. Islam mengatur semuanya tanpa cacat.”

Kemudian setelah 3 paragraf tadi yang isinya mendukung poligami, kemudian ditutup oleh penulis dengan paragraf penutup sebagai berikut:

“Namun, dipungkiri atau pun tidak, demokrasi dan kebebasannya telah kebablasan. Eyang Subur hanya -lah satu dari sekian bukti bahwa demokrasi benar-benar menyuburkan bermacam interpretasi atas hukum Islam yang haq. “

Kesimpulan yang dibuat oleh penulis artikel tersebut pada akhir kesimpulan yang makin menunjukkan biasanya sang penulis, karena secara memaksa mencoba melakukan korelasi atas Demokrasi dengan kasus Eyang Subur.

### 3. www.ismaweb.net



Gambar 3. Website ismaweb.net

Pada artikel dengan judul : “Perlawanan yang berubah kepada ‘peperangan’” ini merupakan salah satu artikel yang pembahasannya menentang demokrasi. Terlebih dilengkapi dengan ilustrasi

yang cukup mencolok bertuliskan: "Do You Believe in Democracy?".

Artikel yang terbuka menentang adanya demokrasi ini ditulis oleh Dollah Sani Suratman, YDP ISMA Shah Alam, menunjukkan secara terbuka penulis dan lembaganya.

Kalimat provokatif dalam paragraf awal dan kedua artikel ini secara jelas mengarah sikap penulis yang anti dengan demokrasi, seperti tulisannya berikut ini :

"Hidup sentiasa ada lawan ataupun pasangan, sebagaimana sunnah alam. Baik ada, buruk pun ada. Positif lawan negatif. Si jantan pasangannya si betina. Yang menakjubkan, suami isteri adalah pasangan tetapi yang pelik pula tidak sedikit jua keadaan di mana mereka berlawan. Sesekali berlawan lain kali berkawan pula. Maknanya dalam berkawan itu ada berlawan dan dalam berlawan itu ada berkawan. Itu sepatutnya menjadi perkara biasa dalam kehidupan kita. Itu semua sedia faham terutama bagi orang yang mengaku cerdik. Perlawanan banyak jenis, mari lihat perlawanan politik. Perlawanan ini adalah jalan untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Menang jadi pemerintah dan kalah jadi pembangkang. Sistem ini dipanggil demokrasi untuk memilih bukan ketua negara tetapi pemerintah negara. Demokrasi ini 'barang buatan' barat. Sebagaimana semenjak Khilafah Uthmaniyyah runtuh sistem baratlah yang diguna pakai."

Kemudian setelah terang-terangan mendiskreditkan demokrasi, penulis kemudian menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang harus dicurigai dan tidak dipercayai karena berasal dari "barat" yang seolah semuanya adalah suatu tipu muslihat:

"Adalah patut untuk mencurigai akan perlawanan kategori ini. Sebab dari asal usulnya itu pun sudah patut curiga. Takkan dah lupa yang sistem ini lahir dari pihak yang telah menjatuhkan Islam. Pihak yang berlawan dengan Islam. Kemudian ia dipaksakan untuk dilaksana di negara Islam jajahan. Umat pun terima ia kerana nampak baiknya (muslihat barat)."

Penulis artikel ini seolah lupa bahwa dirinya sendiri bisa menulis dengan bebas terbuka di internet, karena kehidupan negaranya yang masih mengandung konsep demokrasi. Namun tanpa malu-malu kemudian penulis artikel ini mencoba

memprovokasi dengan upaya jihad, melakukan perlawanan terhadap demokrasi :

"Terbukti kini demokrasi barat yang dianut ini telah menjelmakan ruparapas sebenarnya yang amat hodoh. Ia adalah 'peperangan' yang diselindungi dalam 'perlawanan'.

Sesiapa yang memiliki sedikit ilmu atau pengalaman sudah tentu dapat melihatnya. Meletakkan harapan yang 'total' untuk membangunkan kesejahteraan manusia dari atas pentas perlawanan ini adalah bohong. Apatah lagi untuk membangunkan penguasaan Islam yang mulia pasti akan menemui kekecewaan. Sesiapa melancarkan jihad di atasnya adalah sebuah penyelewengan yang tuntas."

Tetapi anehnya, dalam paragraf berikutnya inkonsistensi tampak muncul pada diri sang penulis artikel ini, yakni dengan menyerukan dibolehkannya demokrasi digunakan untuk mengumpulkan masa. Yakni dengan kalimat:

"Kalau nak guna pakai demokrasi sekali pun ia patut bersifat sementara, iaitu sementara mengumpulkan kekuatan semula ummat, melalui rawatan ummat dari kesan pertarungan lalu."

Kemudian secara lebih rinci penulis artikel ini mencoba menyusun kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa buruknya demokrasi dalam kehidupan :

"Teramat malang apabila makin beria-ia berlawan makin banyak dan cepatlah kerosakan. Lebih malang ia sama bangsa sama agama. Leka berlawan tak sedar kerosakan, bila sedar ada kerosakan yang salah tentulah si lawan. Lalu masing-masing sibuk mengumpulkan dan mencipta bukti akan kesalahan pihak lawan. Dibongkarnya segala keburukan akan agama lawannya. Maka terserlahlah akan keburukan agama itu. Pihak lain membongkar pula segala keburukan bangsa lawannya maka terserlah segala keburukan bangsa itu. Itulah untuk tatapan manusia seluruhnya dan generasi selanjutnya. Adakah di situ ada kebaikan? Bukankah merosak diri sendiri namanya?"

Pada paragraf berikutnya penulis artikel ini makin menyalahkan demokrasi dengan segala kerosakan yang ada di dunia. Kemudian memperlihatkan bahwa peperangan dilancarkan oleh demokrasi dan pendukungnya untuk menghancurkan agama, sehingga sudah seharusnya dilawan melalui apa saja :

“Masyarakat pun kata, ‘Ya benar memang buruk bangsa itu’. Kemudian berkata lagi, ‘Ya benar, memang buruk agama itu’. Kerana orang-orangnya yang tak henti berlawan. Perlawanan berterusan menjadi lebih sengit, lebih inovatif hingga berubah menjadi ‘perang.’ Lalu makin luaslah medan pertarungan di mana saja, kedai kopi, masjid, surau, balai raya, pejabat-pejabat, sekolah, suratkhbar, tv, internet dan seterusnya. Tak kira pihak mana pun, kalau menyokongnya, akan suci belaka penyokongnya itu. Bangsa apapun, agama apapun, buruk manapun jua. Orang-orang terus leka.. demokrasi berdiam diri saja.

Dengan semua itu, apakah saat ketika diisytiharkan siapa saja pemenangnya nanti, akan lebih hebat agamaku begitu juga bangsaku ini ?”.

Penulis kemudian menunjukkan pentingnya melakukan perlawanan untuk kemenangan ummat sebangsa dan seagama. Naifnya penulis tampak jelas. Bagaimana bisa sebangsa dan seagama? Karena di Malaysia terdiri atas beragam suku bangsa dan agama, Islam bukan agama tunggal. Seperti yang dia tuturkan :

“Sepatutnya ia berlawan pada tempohnya sahaja. Waktu yang selebihnya ialah ruang berkawan, paling tidak pun tak berlawan demi membina ummat sebangsa dan seagama. Tetapi jika terus-terusan berlawan tak kira tempat dan waktu, itu petanda sampailah masa untuk keluar meninggalkan perlawanan. kerana mudarat lebih besar dari kebaikan. Umpama perlawanan bola sepak kalau dah tak terkawal lagi, sudah pasti akan ditamatkan.”

Di akhir artikel, penulisnya mencoba mengakhirinya dengan frase yang mencoba menguatkan gagasan satu bangsa dan satu agama di Malaysia :

“Aduhai bangsaku, berpakat-lah demi agamamu.”

#### 4. Pembina.com.my

Artikel dengan judul: “Liberal, Liberalis, Islam Liberal & Liberalisme di Malaysia” merupakan artikel anti demokrasi yang ditulis oleh: Muslim Bin Abdullah Zaik,JK Aktivisme Mahasiswa,Persatuan Belia Islam Nasional (PEMBINA) Gombak.

Artikel ini sejak awal sudah menunjukkan pertentangannya dengan kelompok Liberal yang

dianggap oleh penulis artikel ini sama persis dengan kelompok pendukung demokrasi. Maka ungkapan yang sangat sinis tampak jelas di awal artikel:



Gambar 4. Website Pembina.com.my

“Golongan ini semakin menonjolkan diri semenjak peristiwa 11 September 2001, ketika umat Islam dilanda krisis dan fitnah yang dilemparkan oleh Barat dan pendokong-pendokong mereka. Ada pihak yang mengambil kesempatan menanggung di air yang keruh, cuba menjadi wira dengan memperkenalkan “*moderate muslim*”, kononnya bagi menunjukkan ajaran Islam itu ramah (Islam baru yang lebih ramah), walhal agama Islam sudah sememangnya ramah dan seme-mangnya bersifat wasatiah. Mereka bukanlah meramahkan Islam sebaliknya meremehkan hukum dan ketetapan Islam itu sendiri. Semestinya golongan ini mendapat pengiktirafan dan sumbangan dari Barat sama ada dari segi peruntukan dan sebagainya.”

Meskipun di paragraf pertama tidak menunjukkan secara jelas golongan liberal mana yang diserang penulis, namun dalam paragraf berikutnya jelas :

“Siapakah mereka ? Mereka ialah pendokong dan penganut Islam Liberal yang menjadikan ideologi liberalisme sebagai pegangan mereka. Umat ini memang ditimpa pelbagai masalah dan musibah, tetapi penyelesaiannya bukanlah dengan mengimport ideologi-ideologi kufur yang bertuhankan selain Allah ataupun menempelkan ideologi-ideologi ini pada Islam. Bahkan mereka menjadikan Islam semata-mata sebagai “cosmetic make-up” bagi mengaburi

mata umat, sedangkan di sebaliknya mereka membawa satu agenda Kristianisasi yang sangat halus. Kristianisasi ini bukanlah semata-mata mengkristiankan orang Islam, tetapi sudah cukup dengan mengeluarkan orang Islam daripada pegangan mereka yang asal.”

Kemudian di paragraf berikutnya makin terbuka ketidaksenangan penulis pada kelompok yang dikategorikannya sebagai kelompok Islam Liberal:

“Saya tidak ingin merungkai panjang sejarah asal liberalisme, tetapi kita perlu mengetahui bahawa liberalisme adalah kesinambungan sekularisme yaitu pengasingan agama daripada pengurusan pemerintahan dan kehidupan. Liberalisme ialah ideologi yang lebih “*advance*” yaitu manusia mempunyai kebebasan mutlak dalam tingkah laku mereka tanpa terikat kepada undang-undang atau penetapan dan meletakkan neraca akal dan logik melebihi segala-galanya termasuk neraca wahyu. Kebanyakan penganut Islam Liberal menggelarkan diri mereka sebagai reformis dan golongan ‘*renaissance*’ yang konon-nya membawa perubahan pada masyarakat, padahal mereka hanya meruntuhkan sesuatu yang sudah kukuh tanpa membina sesuatu yang baru. Secara ringkasnya mereka hanya ada kemahiran meruntuhkan tanpa kemahiran membina.”

Kemudian lebih lanjut penulis artikel ini mencoba mengangkat isu kelompok Islam Liberal dengan situasi yang ada di Malaysia :

“Jika kita menyingkap kembali isu-isu yang berlaku di sekitar tahun 2012 di Malaysia, daripada isu murtad dan kristianisasi hinggalah isu kemasukan tokoh liberal ke negara ini, dapat kita lihat corak dan strategi mereka yang akan menanggung di air yang keruh, berusaha mempamerkan diri mereka sebagai penyelamat dan penyelesaian masalah bahkan menggambarkan pihak berautoriti agama sebagai pihak yang bersalah. Antaranya dalam isu LGBT, Erykah Badu, Hamzah Kashgari, Irshad Manji dan isu terbaru berkenaan gerakan Syiah di Malaysia”

Dalam paragraf selanjutnya yang lebih panjang dari paragraf-paragraf sebelumnya, penulis artikel ini mengkritik salah satu kelompok Islam Liberal, yang dikategorikan sebagai musuh Islam:

“Jika diteliti kenyataan-kenyataan mereka khususnya *Islamic Renaissance Front* (IRF) terhadap isu-isu berkenaan, mereka sering

memetik dan menterjemahkan ayat 256 daripada Surah Al-Baqarah yang bermaksud, “Tiada paksaan dalam urusan agama,” dan menggunakan ayat ini bagi menyokong slogan “*freedom of speech*” iaitu kebebasan suara. Sedangkan ayat ini sebenarnya bermaksud, “Tiada paksaan dalam menganut agama Islam”, dan ayat ini ditujukan kepada golongan bukan Islam yang mana mereka tidak boleh dipaksa untuk menganut agama Islam. Bagi penganut Islam pula, setelah menganut agama Islam, mereka perlulah mengikut dan mentaati perintah arahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan terikat kepada peraturan dan undang-undang Islam.

Kebebasan bersuara melebihi sempadan syara’ bukanlah suatu yang bersifat moderat bahkan ekstrim dalam bersuara, sehingga ke tahap menafsirkan Al-Qur’an sesuka hati mengikut nafsu mereka. Neraca mereka bukanlah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Ulama dan Qiyas lagi, tetapi ‘sunnah’ Human Right Watch dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Antarabangsa (Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948). Bahkan sewenang-wenangnya berijtihad menggunakan dalil-dalil syaral dengan menggunakan logik akal tanpa berpandukan kaidah-kaidah syarak yang betul dan syarat-syarat yang telah ditentukan. “

Kemudian penulis artikel ini menulisa panjang lebar tentang siapa saja yang dianggapnya sebagai pendukung dan penyokong Islam Liberal, dengan memberikan sub judul: **Siapa di sebalik mereka?**, yang isinya kemudian merujuk pada sebuah organisasi pendukung demokrasi sebagai salah satu sumber permasalahan :

“Jika dilakukan sedikit kajian, di sebalik golongan Islam Liberal ini terdapat pemikir-pemikir barat seperti Cheryl Benard, Benard Lewis, Richard Nixon dan beberapa orang lagi yang sebahagian besarnya terlibat dalam penafsiran Islam Liberal. Usaha pembiayaan golongan liberal ini juga berjalan secara terancang bagi mengangkat golongan ini di mata dunia. Setelah Barat memecahkan umat Islam kepada kelompok ‘fundamentalist dan moderate’ mengikut tafsiran mereka sebelum ini, mereka cuba mencipta pecahan kelompok Islam yang baru yaitu Islam Liberal dengan menggunakan nama Moderate Islam, yang mana diangkat sebagai Islam yang dikatakan sederhana dan melabelkan golongan

fundamentalist sebagai golongan yang ekstrim dan radikal.

Mengikuti laporan tahunan 2010 oleh National Endowment of Democracy (NED) yang diterbitkan pada Ogos 2011, terdapat beberapa organisasi di Malaysia yang menerima dana yang dibiayai mereka bagi mempromosi usaha-usaha demokrasi yang selari dengan objektif NED (Amerika Syarikat), antaranya media online seperti Malaysiakini, dan badan NGO hak asasi manusia seperti SUARAM. Pembentukan golongan moderat ini bagi membentuk persekitaran politik dan undang-undang di negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh Barat, mengikuti acuan mereka.”

Kemudian dalam tiga paragraf terakhir penulis artikel ini berupaya menunjukkan bahwa isu Liberalisme ditolak oleh negara, pemerintah dan rakyat Malaysia. Sebuah penulisan artikel yang mencoba memonopoli kebenaran, tanpa disertai bukti dan data yang akurat :

“Umat Islam perlu melihat permasalahan ini dari sudut pandangan yang lebih luas dan dalam, tanpa terperangkap dalam kotak pemikiran yang sempit termasuk melalui perspektif politik kepartian. Kita perlu sedari bahawa peperangan sekarang ialah peperangan arus globalisasi, antara Arus Globalisasi Barat dan Arus Globalisasi (‘Alamiyah) Islam. Arus mereka berpadu dan bersepakat dalam mengikis jati diri umat Islam termasuklah umat Islam Melayu di Malaysia. Penting bagi pihak kerajaan, pembangkang dan rakyat untuk menilai apakah aulawiyat (keutamaan) semasa, dalam menjaga kepentingan orang Melayu selaku majoriti umat Islam di negara ini. Kesepakatan tanpa kompromi amatlah perlu dalam membendung ideologi-ideologi ini. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jangan nanti sudah terhantuk baru terngadah.

Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia atas usaha beliau meletakkan Agenda Islam Dalam Transformasi Negara dan juga jaminan yang diberikan bahawa LGBT, liberalisme dan pluralisme tidak akan mendapat tempat di negara ini. Begitu juga cadangan Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS agar penetapan Islam sebagai cara hidup diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia.

Komitmen semua pihak, tidak kira pihak kerajaan, pembangkang, kerajaan-kerajaan negeri, pentadbiran pusat dan negeri, agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh rakyat dan warganegara tanah air tercinta ini untuk memelihara serta mengukuhkan lagi kedudukan agenda Islam di dalam negara menjadi satu jaminan dan imunisasi awal ke arah melihat kedudukan Islam akan terus terpelihara buat generasi akan datang.”

## V. KESIMPULAN

Wacana yang coba ditawarkan oleh keempat artikel dalam empat website Islam yang ada di Indonesia dan Malaysia ini menunjukkan upaya secara terbuka dan terang-terangan pihak pengelola website tersebut bersama dengan para penulisnya, untuk menolak demokrasi.

Konsep dan wacana demokrasi ini kemudian dibenturkan dengan ketidaksinambungannya dengan konsep yang ada dalam Islam. Sehingga seolah tidak ada ruang bagi pendukung demokrasi. Para pengelola website dan para penulis artikel tersebut seolah lupa, bahwa mereka menulis melalui media internet dengan cara terbuka itu pun bagian dari kebebasan kehidupan demokrasi di negara masing-masing.

Nilai-nilai demokrasi oleh kesemua penulis dianggap semata-mata produk barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun dua dari penulis artikel tersebut masih merasa perlu menggunakan sarana demokrasi sebagai alat untuk nantinya mengumpulkan massa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Armstrong, Karen. 1993. *Sejarah Tuhan*. Bandung: Mizan
- [2] Armstrong, Karen. 1994. *Berperang Demi Tuhan*. Bandung: Mizan
- [3] Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- [4] Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London : Verso.
- [5] Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Cetakan I. Jakarta: Penerbit Paramadina.

- [6] Bocoock, Robert. 2007. *Pengantar Kompre hensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta:Penerbit Jala Sutra.
- [7] Branston, Gill and Roy Stafford. 2003. *The Media Student's Book*. New York : Routledge
- [8] Chilton, Paul. 2004. *Analysing Political Discourse, Theory and Practice*. Oxon: Routledge.
- [9] Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- [10] Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language* New York : Longman Group Limited.
- [11] Goh, Daniel P.S., et al. 2009. *Race and multiculturalism in Malaysia and Singapore*. Routledge Malaysian studies series. New York: Routledge.
- [12] Griffin, EM. 2006. *A First Look at Communication Theory*. Sixth Edition New York: McGraw-Hill.
- [13] Habermas, Jurgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Reason and Rationalization of Society*. Volume One. Boston: Beacon Press Book.
- [14] Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity.
- [15] Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critrical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- [16] Held, David. 1980. *Introduction To Critical Theory*. London: Hutchinson & Co.
- [17] Heryanto, Ariel. 2000. *Perlawanan Dalam Kepatuhan, Esai-Esai Budaya*. Bandung: Mizan Pustaka.
- [18] Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina
- [19] Liow, Joseph Chinyong. 2009. *Piety and politics : Islamism in contemporary Malaysia*. New York: Oxford University Press.
- [20] Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*. Seventh Edition. USA: Wadsworth Group.
- [21] McNall, G. Scott. 1979. *Dialectical Social Science, from Theoretical Perspectives in Sociology*. New York: St. Martin's Press.
- [22] Mubarak, M. Zaki. 2008. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- [23] Muhtadi, Asep Saepulah. 2008. *Komunikasi politik Indonesia: dinamika Islam politik pasca-Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [24] Nafis, Muhamad Wahyuni. 1996. *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Penerbit Paramadina
- [25] Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods, Qualitatif and Quantitative Approaches*. Massachussets: Allyn and Bacon A Viacom Company.
- [26] Nimmo, Dan D. 1978. *Political communication and public opinion in America*. Santa Monica: Goodyear Pub. Co.
- [27] Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: Sage Publications, Inc.
- [28] Palmer, Richard E. 1991. *The Relevance of Gadamer's Philosophical Hermeneutics to Thirty Six Topics or Fields of Human Activity*. Illinois: Southern Illinois University Carbondale.
- [29] Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- [30] Winchester, Simon. 2005. *Krakatoa, The Day The World Exploded, August 27, 1883*. New York: Harper Perennial
- [31] Ayoob, Mohammed. 2004. *Political Islam: Image and Reality*. In *World Policy Journal*. Volume 21 Issue 3. Yale University Press.
- [32] Dahlan, M. Alwi. 1999. *Teknologi Informasi dan Demokrasi*. Jakarta: Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi edisi "Komunikasi Politik" No.4 Oktober.
- [33] Guidere, Mathew and Newton Howard. 2006. *The Clash of Perception*. Working Paper in Center For Advance Dehense Studies, Washington DC: Defense Concept Series
- [34] Perwita, Anak Agung Banyu. 2005. *Islam "Symbolic Politics" I, Democratization and Indonesian Foreign Policy*. CAEI Working Paper. Italy : Centro Argentino de
- [35] <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/islam-dan-demokrasi.html>
- [36] <http://muslim.or.id/manhaj/syura-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.html>
- [37] <http://www.erasuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/kesombongan-sistem-demokrasi.htm>
- [38] <http://www.erasuslim.com/berita/nasional/wajar-kita-anti-demokrasi-karena-sistem-ini-gagal-menegakkan-keadilan.htm>
- [39] <http://hizbutahrir.or.id/2009/04/11/demokrasi-sesuai-dengan-islam/>